

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Akuntansi sektor publik di Indonesia termasuk baru dalam bidang akuntansi. Akuntansi sektor publik merupakan akuntansi yang dipakai dalam suatu organisasi pemerintah yang tidak bertujuan untuk mendapatkan keuntungan serta bagian dari kedisiplinan ilmu. Oleh sebab itu, dalam pelaksanaan kinerja pemerintah perlu diukur agar masyarakat dapat mengetahui bagaimana pemerintah melaksanakan tanggungjawabnya atas program kegiatan yang telah direncanakan.

Prinsip yang perlu dan harus dikembangkan saat ini adalah prinsip tata kelola keuangan. Dalam menciptakan prinsip tata kelola yang baik maka diperlukan penguatan sistem dan kelembagaan dengan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan serta standar penyajian keuangan yang berlaku. Laporan keuangan yang dibuat merupakan suatu bentuk kebutuhan transparansi untuk syarat pendukung adanya akuntabilitas yang berupa keterbukaan (*Openess*) pemerintah dalam melakukan aktivitas pengelolaan sumberdaya publik. Transparansi di keuangan harus dilakukan untuk memberikan informasi keuangan kepada pihak-pihak berkepentingan yang akan digunakan dalam mengambil keputusan ekonomi, sosial, dan politik. Informasi keuangan ini digunakan untuk membandingkan kinerja keuangan yang ada dengan yang dianggarkan, menilai kondisi keuangan dan hasil-hasil operasi, membantu menentukan

tingkat kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah keuangan dan ketentuan lainnya, serta membantu dalam mengevaluasi efisiensi dan efektivitas.

Masyarakat menuntut agar pemerintah dapat mengelola anggaran secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Sehingga, perlu dilakukan implementasi akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah yang diharapkan mampu meningkatkan kinerja pemerintah daerah (Wiguna, S, 2015). Akuntabilitas pada sektor publik digunakan untuk meminimalisir kecurangan atau penyalahgunaan wewenang serta digunakan juga untuk meningkatkan kinerja pemerintah kota. Sedangkan transparansi publik pada pemerintah kota digunakan untuk menyajikan segala informasi kepada masyarakat secara terbuka dan sebenar-benarnya agar masyarakat atau pihak yang berkepentingan dapat memantaunya secara langsung.

Pemerintah kota merupakan daerah otonomi yang berhubungan langsung dengan masyarakat, sehingga diharapkan pemerintah kota mampu untuk mengerti dan memahami aspirasi-aspirasi masyarakat. Penyelenggaraan pemerintah kota dapat berfungsi dengan baik dengan cara mewujudkan sifat demokratis, transparan, dan bertanggungjawab. Menurut Mayasari (2012), kemungkinan pemerintah kota akan leluasa untuk melakukan penyalahgunaan dalam penyelenggaraan pemerintah, khususnya dalam pengelolaan APBD.

Pengukuran kinerja merupakan evaluasi dari suatu instansi pemerintah mengenai kegiatan atau program yang telah dilaksanakan. Pengukuran kinerja sekaligus juga digunakan sebagai tolok ukur yang

dibuat berdasarkan basis regular dan pelayanan publik dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan transparansi publik. Akuntabilitas dan transparansi merupakan azas yang digunakan untuk menentukan setiap kegiatan dan hasil akhir dari pengelolaan anggaran yang harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai kedaulatan tertinggi.

Pemerintahan yang baik (*good governance*) dalam mengelola anggaran memiliki ciri utama yaitu akuntabilitas dan transparansi. Prinsip-prinsip *good governance* dalam penyelenggaraan negara tidak lepas dari masalah akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan negara, tujuan di berlakukannya PP No. 71 tahun 2010 adalah agar laporan keuangan lebih akuntabel dan berkualitas. Informasi akuntansi yang terdapat di dalam laporan keuangan pemerintah daerah harus bermanfaat dalam mendukung pengambilan keputusan serta dapat dipahami oleh pengguna laporan keuangan tersebut. Tercapainya anggaran yang baik tidak terlepas dari pengawasan dalam penyusunan maupun penggunaan anggaran.

Penyusunan laporan keuangan adalah suatu bentuk kebutuhan transparansi yang merupakan syarat pendukung adanya akuntabilitas yang berupa keterbukaan pemerintah atas aktivitas pengelolaan sumber daya publik. Transparansi informasi dilakukan dalam bentuk yang relevan dan mudah dipahami serta dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Oleh karena itu, informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik seharusnya secara langsung dapat diperoleh oleh semua pihak yang membutuhkan, transparansi berarti bahwa laporan keuangan tidak hanya dibuat tetapi juga terbuka dan dapat

diakses oleh masyarakat karena mengingat aktivitas dan program pemerintah adalah menjalankan amanat rakyat.

Dinas pemerintah daerah yang dipilih dalam penelitian ini adalah Dinas yang berada di mall pelayanan publik siola yang terletak di Jl. Tunjungan No. 1-3 (Eks. Gedung Siola). Dinas yang berada di mall pelayanan publik siola terdiri dari Dinas koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan; Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olah Raga, serta Pariwisata; Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja; Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Peneliti melakukan penelitian di dinas-dinas tersebut karena dinas-dinas tersebut berada di satu lokasi yang terletak di Mall Pelayanan Publik Siola.

Menurut hasil penelitian awal yang dilakukan peneliti terhadap kelima dinas yang berada di mall pelayanan publik siola tersebut belum sepenuhnya menerapkan prinsip *Good Governance*. Dimana Menurut hasil wawancara peneliti kepada Bu Winda selaku staff bagian keuangan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan menyatakan bahwa Laporan Keuangan yang dimiliki Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan ini belum dapat diakses secara mudah oleh masyarakat, sehingga muncul adanya persepsi tidak adanya transparansi anggaran dan tidak adanya tanggungjawab atas anggaran yang telah digunakan oleh dinas tersebut. Hasil wawancara ini didukung dengan adanya pernyataan dari Bu Elly selaku staff bagian kepegawaian Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olah Raga, serta Pariwisata dan Pak Marsono selaku staff bagian keuangan Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil yang menyatakan bahwa pelaporan kinerja yang dituangkan dalam LAKIP pada dinas ini tidak sepenuhnya dapat diketahui oleh masyarakat sehingga masyarakat tidak dapat mengevaluasi pertanggungjawaban anggaran yang dilakukan oleh dinas tersebut apakah sudah tersusun secara jujur dan objektif atau belum. Pernyataan tersebut juga didukung oleh pernyataan dari Pak Yanuar selaku kepala bagian keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu serta Pak Heri selaku staff bagian kepegawaian Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja yang menyatakan bahwa Laporan Keuangan dan LAKIP yang dimiliki dinas-dinas tersebut belum bisa diakses oleh masyarakat luas hanya digunakan untuk laporan internal saja. Sehingga, masyarakat tidak tau mengenai bagaimana pertanggungjawaban anggaran yang telah digunakan oleh dinas tersebut. Oleh karena itu, hasil yang ditemukan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

**Tabel 1.1**  
**Hasil Penelitian Awal**

No.	Keterangan	Hasil/Temuan
1.	Transparansi	Belum adanya keterbukaan dalam memberikan informasi data laporan keuangan kepada masyarakat.
2.	Akuntabilitas	Tidak adanya pertanggungjawaban yang jelas terhadap anggaran yang dikeluarkan kepada masyarakat.

**Sumber: Peneliti**

Seharusnya sektor publik harus dapat memberikan hak kepada masyarakat untuk memperoleh informasi dengan mengakses data laporan keuangan yang ada. Namun, ketiga dinas tersebut belum melaksana secara maksimal dan kurangnya praktik yang sehat dalam keterbukaan pemberian informasi data laporan keuangan kepada masyarakat. Selain itu

transparansi, pada kelima dinas tersebut belum menerapkan prinsip akuntabilitas karena dalam keterbukaan laporan keuangan maupun LAKIP hanya dapat diakses oleh pihak internal saja. Sehingga tidak adanya pertanggungjawaban atas kebijakan-kebijakan yang diambil terhadap masyarakat luas dan tidak adanya pertanggungjawaban yang jelas dalam mengelola anggaran yang dikeluarkan kepada masyarakat.

Banyak penelitian dan pendapat yang mengatakan bahwa terdapat kaitan penerapan akuntabilitas dan transparan dalam meningkatkan kinerja pemerintah yang baik. Berdasarkan penelitian Jatmiko (2020), membuktikan bahwa akuntabilitas dan transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah. Pernyataan tersebut juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Sembiring (2020) yang menyatakan bahwa akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pemerintah kota Medan.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas serta fenomena yang ada, maka penulis menyusun skripsi ini dengan judul **“PENGARUH AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI ANGGARAN BERBASIS KINERJA TERHADAP KINERJA DINAS YANG BERADA DI MALL PELAYANAN PUBLIK SIOLA KOTA SURABAYA”**.

## **1.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka rumusan masalah yang diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah akuntabilitas anggaran berbasis kinerja berpengaruh terhadap kinerja Dinas yang berada di mall pelayanan publik siola?
2. Apakah transparansi anggaran berbasis kinerja berpengaruh terhadap kinerja Dinas yang berada di mall pelayanan publik siola?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan dilakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh akuntabilitas anggaran berbasis kinerja terhadap kinerja Dinas yang berada di mall pelayanan publik siola.
2. Untuk mengetahui pengaruh transparansi anggaran berbasis kinerja terhadap kinerja Dinas yang berada di mall pelayanan publik siola.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Akademis
  - a. Bagi Universitas, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi tambahan literatur pada pengembangan ilmu akuntansi, khususnya mengenai akuntabilitas dan transparansi anggaran berbasis kinerja terhadap kinerja Dinas kota Surabaya khususnya di dinas yang berada di mall pelayanan publik siola.
  - b. Bagi peneliti, diharapkan dapat menjadi sarana untuk menambah pengetahuan, wawasan dan informasi tentang pengaruh akuntabilitas dan transparansi anggaran berbasis

kinerja terhadap kinerja pemerintah daerah khususnya di dinas yang berada di mall pelayanan publik siola serta kedepannya diharapkan menjadi acuan bagi peneliti berikutnya, dalam rangka pengembangan ilmu mengenai topik kinerja pemerintah daerah ini.

## 2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat dan masukan untuk referensi pengetahuan akuntansi yang melibatkan peran akuntabilitas dan transparansi suatu entitas khususnya bagi para anggota dinas yang berada di mall pelayanan publik siola.